



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

Jalan Raya Sentani – Waena, Distrik Heram Kota Jayapura 99358
Situs www.ptun-jayapura.go.id, e-mail ptun.jayapura@gmail.com

Jayapura, 13 Agustus 2024

Nomor : 913/KPTUN.W8-TUN3/OT1.6/VIII/2024
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Laporan Bulan Juli 2024

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

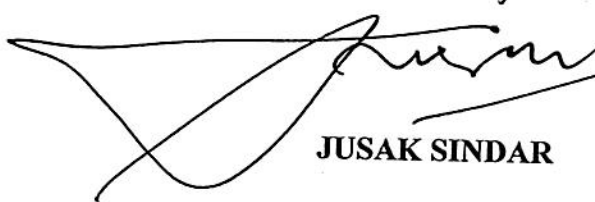
Di –

M A N A D O

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Bulan Juli Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA, 

JUSAK SINDAR

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN JULI TAHUN 2024**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan	8
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	9
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.	9
B. Tugas Pokok.	9
C. Fungsi.	9
D. Manajemen Kepaniteraan.	10
Struktur Organisasi.	10
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan.	11
E. Manajemen Kesekretariatan	16
1. Struktur Organisasi.	16
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan.	17
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi.	32
A. Kesimpulan.	32
B. Rekomendasi.	32
LAMPIRAN	33
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01.	34
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05.	37
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNPB DIPA 005.01.	40
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNPB DIPA 005.05.	43
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6).	46

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.	5
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	6
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	6
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	6
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	7
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	7
Tabel 7.	Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	7
Tabel 8.	Laporan Keadaan Perkara Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 9.	Laporan Jenis Perkara Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 10.	Keadaan Keuangan Perkara Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 11.	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 12.	Biaya Eksekusi s.d Bulan Juni Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 13.	Buku Register Meja Informasi Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	15
Tabel 14.	Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 15.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18
Tabel 16.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18

Tabel 17.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 18.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 19.	Realisasi Penerimaan PNPB Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 20.	Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 21.	Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 22.	Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	21
Tabel 23.	Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	22
Tabel 24.	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	25
Tabel 25.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	26
Tabel 26.	Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	27
Tabel 27.	Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi Lainnya	28
Tabel 28.	Tenaga Honorar yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	28
Tabel 29.	Pegawai yang Mendapat Promosi/Mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	29
Tabel 30.	Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29
Tabel 31.	Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	30

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan Juli secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas

3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat.

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 351/KPTUN.W8-TUN3/SK.KP.I/III/2024 Tentang Penetapan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri

7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrauw	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009

8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – 2023
14	JUSAK SINDAR, S.H	Periode 2023 – sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Mekanisme penyusunan laporan ini memanfaatkan aplikasi Sistem SIPACE yang dikembangkan oleh Pranata Komputer Tingkat Pertama. Adapun sistematika penyajian laporan ini dapat diuraikan antara lain :

Bab I. Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan lingkup pekerjaan dan manfaat dokumen laporan bulanan dengan keterkaitannya terhadap laporan

Bab II. Menguraikan pelaksanaan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada bulan berkenaan.

Bab III. Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

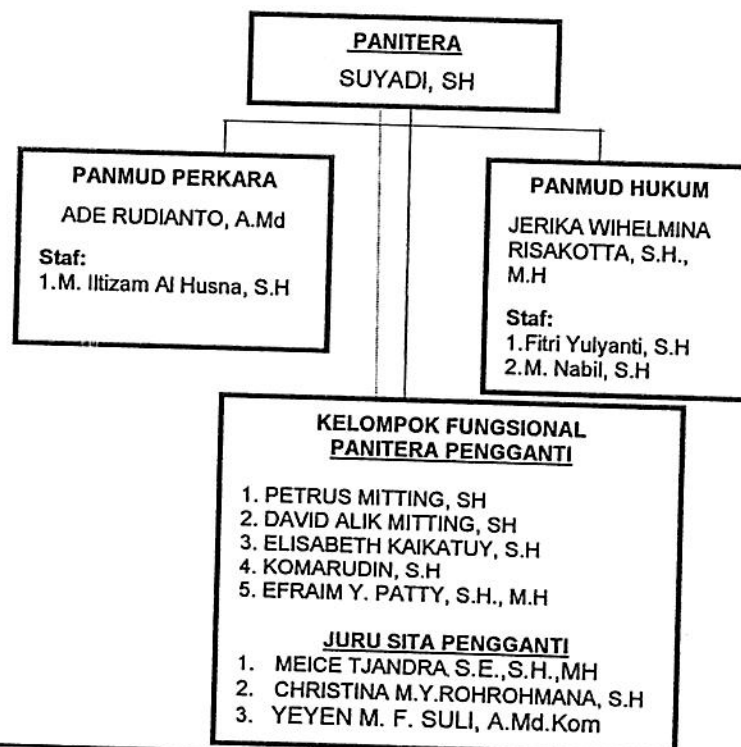
D. Manajemen Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

1. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan

Pada bab VI tentang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A terdiri atas:

a. **Kepaniteraan Muda Perkara;** Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Mei Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Juli Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Keadaan Perkara Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA	SISA BLN LALU	MASUK BLN INI	PUTUS BLN INI	SISA SD BLN INI	KETERANGAN			
						CABUT	GUGUR	PLW	DISMISAL
1	Gugatan	8	4	-	11	1	-	-	-
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Juli Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan Jenis Perkara Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JENIS PERKARA	SISA BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Pertanahan	2	4	5
2	Kepegawaian	2	-	2
3	Perijinan	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-
18	Merek	-	-	-
19	Lain-lain	4	-	4
Total		8	4	11

1.3. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Juli Tahun 2024

Tabel 10. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	26,115,000	-	-	26,115,000
2	Penerimaan	-	6,656,000	-	6,656,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	625,000	625,000
4	Biaya Panggilan	-	-	75,000	75,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	1,094,000	1,094,000
6	Biaya Pemeriksaan setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan dan Pengiriman Berkas	-	-	150,000	150,000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	503,000	503,000
9	Materai	-	-	30,000	30,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	190,000	190,000
	b. Redaksi	-	-	30,000	30,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	381,000	381,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	931,000	931,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	26,115,000	6,656,000	4,009,000	28,762,000

1.4. Biaya proses/ATK/Pemberkasan s.d Bulan Juli Tahun 2024

Tabel 11. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	7,320,500	-	-	7,320,500
2	Penerimaan	-	625,000	-	625,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	-	-
	Jumlah	7,320,500	625,000	-	7,945,000

1.5. Biaya Eksekusi s.d Bulan Juli Tahun 2024

Tabel 12. Biaya Eksekusi s.d Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	934,000	-	-	934,000
2	Penerimaan	-	500,000	-	500,000
3	Pendaftaran Eksekusi	-	-	25,000	-
4	Alat Tulis Kantor	-	-	50,000	-
5	Materai	-	-	-	-
6	Biaya Surat Panggilan	-	-	64,000	64,000
7	Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi	-	-	-	-
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
9	Surat Pemberitahuan kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	934,000	500,000	139,000	1,295,000

1.6. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 5.2.0. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Juli Tahun 2024 adalah 53,85%. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

b. Kepaniteraan Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

- e. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan juli Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 126/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI11/2024 tentang Pembentukan Pengelolaan Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W8-TUN3/110/OT.01.3/2023 tentang Standar Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan.

Tabel 13. Buku Register Meja Informasi Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PEMOHON	TGL DITERIMA	OBYEK PEMOHON	TINDAK LANJUT
1	Regina Suebu	29-7-2024	Pengambilan Salinan Putusan	Mendapatkan Salinan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Bulan ini tidak terdapat Pengaduan yang terdaftar pada buku register Bulan Juli 2024.

2. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Tabel 14. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	PEMOHON	JENIS JASA	JUMLAH JAM LAYANAN	KET
1	Paulus W. Hamadi	Konsultasi Hukum Terkait Hak Ulayat	1 Jam	-
2	Sri Ulfinda	Konsultasi Hukum Terkait Percobaan Penipuan Melalui Arisan	1 Jam	-
3	Huygens Joule Monim	Konsultasi Hukum Terkait PTDH	1 Jam	-
4	Marta S. Rendat	Konsultasi Hukum Terkait Pemukulan	1 Jam	-
5	Lisa Saepul	Konsultasi Hukum Terkait Penipuan Untuk Menjadi CPNS	1 Jam	-
6	Alfian Manip Stefanus A	Meminta Pendampingan Advokat di Kejaksaan Negeri Jayapura	1 Jam	-
7	Josephina Lavina Sisinarey	Konsultasi Hukum Terkait Pengangkatan Honorar Menjadi Pegawai	1 Jam	-
8	Simon Renjaan	Konsultasi Hukum Terkait Sertifikat Ganda	1 Jam	-
9	Abdul Aziz	Konsultasi Hukum Terkait Pemalsuan Pelepasan Tanah	1 Jam	-

3. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum.

Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak.

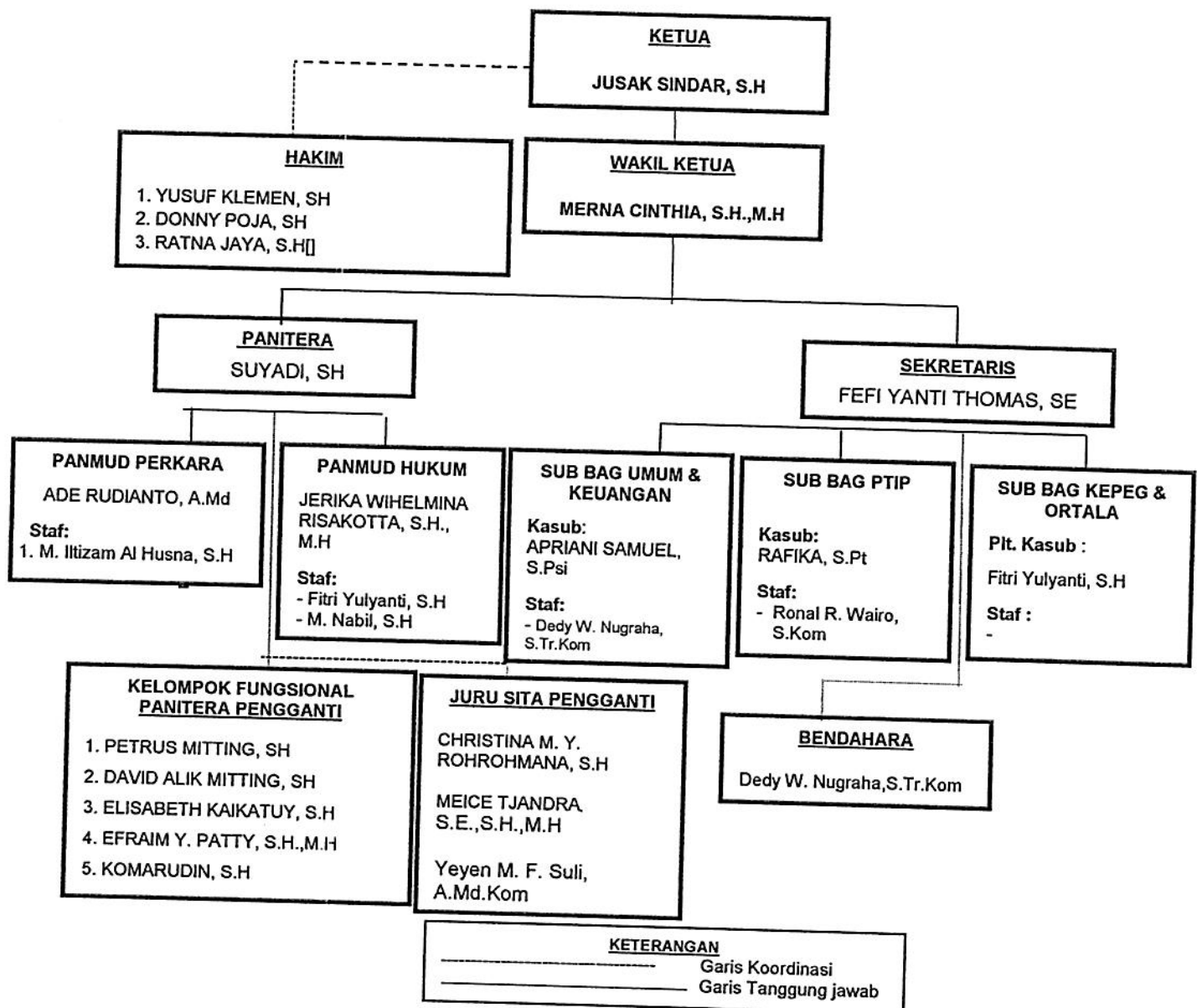
Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

E. Manajemen Kesekretariatan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan Mei Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Anggaran

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 01 PTUN Jayapura Tahun 2024 sampai dengan bulan Juli Tahun 2024.

Tabel 15. Pagu Anggaran DIPA 005.01 Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	3,997,872,000
Belanja Barang	1,908,582,000
Total	5,906,454,000

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 05 PTUN Jayapura Tahun 2024 sampai dengan bulan Juli Tahun 2024

Tabel 16. Pagu Anggaran DIPA 005.05 Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Pengamanan Sidang	20,500,000
Pos Bantuan Hukum	33,000,000
Prodeo	96,670,000
Total	150,680,000

b. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Juli Tahun 2024

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.01)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	3,997,872,000	268,495,768	2,340,925,285	1,656,946,715
2	Barang	1,901,332,000	163,167,327	1,302,255,558	599,076,442
3	Barang Non Operasional	7,250,000	0	6,380,000	870,000

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.05)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	150,680,000	5,000,000	89,170,500	61,509,500
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

c. Laporan PNBPN

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan Juli Tahun 2024 secara umum sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	AKUN	JENIS PENDAPATAN	BLN INI	SD BLN INI
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2,449,927	16,847,124
2	425232	Uang Meja (Leges)	50,000	880,000
3	425233	Ongkos Perkara	220,000	1,200,000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	411,500	4,337,500
		Total		23,264,624

d. Keadaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 2494 m2, halaman gedung 2000 m2 dan pagar 222 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 20. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	TYPE	TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
1	B	1993	700 m2	200 m2
2	B	1993		150 m2
3	C	1992	1100 m2	70 m2
4	C	1992		70 m2
5	C	1992		70 m2
6	C	1992		70 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	TYPE	LUAS TANAH	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN
1	B	700 M2	1659/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Jusak Sindar, S.H	Ketua
2	B	700 M2	1660/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Merna Cinthia, S.H., M.H	Wakil ketua
3	C	1100 M2	1661/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Ratna Jaya, S.H	Hakim
4	C	1100 M2	1662/SEK.PTUN.W8-TUN3/PL1.2.5/XII/2023	Donny Poja, S.H	Hakim

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

**Tabel 22. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura**

NO	NAMA ASET	TAHUN	NO. PLAT	KONDISI	N0.SK	PENGGUNA	JABATAN	KET
1	Toyota Innova	2012	PA 60	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	JUSAK SINDAR, S.H	KETUA	
2	Toyota Innova	2011	PA 1988 DZ	Baik	1664/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	MERNA CINTHIA, S.H., M.H	WAKIL KETUA	
3	Toyota Innova	2011	PA 1810 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	
4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	PA 1689 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	SUYADI, SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 1697 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	229/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/II/2024	APRIANI SAMUEL, S.Psi	KASUB UMUM & KEUANGAN	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	-	-	-	-	TGR
8	Honda	2011	PA 4301 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
9	Honda	2008	PA 4517 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
10	Honda	2008	DS 4518 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
11	Honda	2008	PA 4743 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
12	Honda	2005	PA 4133 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
13	Honda	2009	PA 4658 DZ	Baik	231/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/II/2024	FITRI YULYANTI, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	Plt. Kasub Kepegawaian dan ORTALA
14	Honda	2009	PA 4372 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
15	Honda	2005	PA 4290 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
16	Honda	2007	PA 4396 DZ	Baik	1678/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	ADE RUDIANTO. A.Md	PANITERA MUDA PERKARA	
17	Honda	2011	PA 4132 DZ	Rusak Berat	-	-	-	Proses Penghapusan
18	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	1673/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
19	Honda	2007	PA 3473 DZ	Baik	1663/SEK.PTUN.W8- TUN3/PL1.2.5/XII/2023	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 23. Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	-	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-
3	Genset	1	-	-
4	Sedan	1	-	-
5	Mini Bus	3	-	1
6	Sepeda Motor	8	-	9
7	Kursi Roda	1	-	-
8	Cermin Besar	2	-	3
9	Rak-rak Kayu	14	1	1
10	Lemari Besi	3	-	7
11	Lemari Kayu	30	6	8
12	Brankas	2	-	-
13	CCTV	1	-	-
14	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11
15	Papan Pengumuman	-	1	-
16	White Board	1	-	1
17	LCD Projektor/Infocus	1	-	-
18	Alat Kantor Lainnya	1	-	3
19	Meja Kerja Kayu	57	14	50
20	Kursi Besi	29	4	44
21	Kursi Kayu	20	31	41
22	Sice	5	3	12
23	Bangku Panjang Kayu	20	7	7
24	Meja komputer	-	1	3
25	Meja resepsionis	-	1	-
26	Sketsel	2	-	-
27	Kursi Fiber Glass	23	33	14
28	Sofa	1	-	-
29	AC Split	21	-	15
30	Mixer	2	-	1

31	Televisi	3	-	6
32	Amplifire	2	1	-
33	Loudspeaker	6	-	8
34	Compact disk player	-	1	-
35	Tiang Bendera	4	1	1
36	Kaca Hias	1	-	1
37	Palu Sidang	2	-	1
38	Lambang Instansi	1	-	-
39	Handy Cam	1	-	-
40	Audio Mixing Console	1	-	-
41	Microphone/Wireless Mic	6	-	2
42	UPS	7	-	-
43	Microphone cable	11	-	-
44	Camera Conference	1	-	-
45	Kursi Dorong	1	-	-
46	Walker Polding	2	-	-
47	Komputer jaringan lainnya	3	-	-
48	PC	25	4	13
49	Laptop	8	-	-
50	Notebook	9	6	5
51	Printer	6	6	16
52	scanner	2	-	2
53	server	1	-	1
54	router	1	-	1
55	Rak server	1	-	-
56	Alat Tenis Meja	-	1	-
57	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-
58	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-
59	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-
60	Pagar permanen	1	-	-
61	Referensi	18	-	-

1) Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 893/SEK/SK/X/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung atau Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama untuk dan atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara. Berdasarkan Surat Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/1423/PL.01.02/XII/2021 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Barang Milik Negara Dengan Bukti Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan Diatas Rp. 100.000.000 per Unitnya pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KM.6/WKN.17/KNL.02/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung. Di mana memuat tentang persetujuan status penggunaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupa 11 (sebelas) unit tanah dan bangunan dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp. 22.475.280.544 (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

2) Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Tidak ada pengalihan status Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Penghapusan Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat telah diproses lelang dan menunggu penetapan dari KPKNL Jayapura.

e. Tata Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan

Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 24. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Juli Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Umum & Keuangan.	11	32
2	Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	19	28
3	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	9	4
4	Kepaniteraan Perkara.	8	32
5	Kepaniteraan Hukum.	3	9

1) Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan Juli 2024 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

2) Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan
Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.

2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 25 Orang yang terdiri dari:

**Tabel 25. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Jusak Sindar, S.H	
2.	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	
3.	Hakim	Yusuf Klemen, SH	
4.	Hakim	Donny Poja, S.H.	
5.	Hakim	Ratna Jaya, S.H	
6.	Panitera	Suyadi, S.H	
7.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
8.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
9.	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	
10.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
11.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
12.	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	
13.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
14.	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	
15.	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	
16.	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E., S.H., M.H	
17.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
18.	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	
19.	Juru sita Pengganti	Yeyen. M. F. Suli, A.Md. Kom	
20.	Juru sita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	
21.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
22.	Pengelola Barang Milik Negara	Dedy Widya Nugraha, S.Tr.Kom	Bendahara Pengeluaran
23.	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	Plt. Kasub Kepegawaian & Ortala
24.	CPNS	M. Iltizam Al Husna, S.H	Panmud Perkara
25.	CPNS	M. Nabil, S.H	Panmud Hukum

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JABATAN	NAMA	GOL
1	Ketua	Jusak Sindar, S.H	IV/b
2	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	IV/b
3	Hakim	Yusuf Klemen, SH	IV/b
4	Hakim	Ratna Jaya, S.H	IV/a
5	Hakim	Donny Poja, S.H.	III/d
6	Panitera	Suyadi, S.H	IV/a
7	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	IV/a
8	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
9	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
10	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	III/d
11	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	III/b
12	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	III/b
13	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	III/d
14	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	III/b
15	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	III/b
16	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E., S.H., S.H	III/c
17	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	IV/a
18	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	III/b
19	Juru Sita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	III/b
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
21	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	III/c
22	Juru Sita Pengganti	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/d
23	Pengelola Barang Milik Negara	Dedy Widya Nugraha, S.Tr.Kom	III/a
24	CPNS	M. Iltizam Al Husna, S.H	III/a
25	CPNS	M. Nabil, S.H	III/a

- 1. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi**
 Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi
 pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 27. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN ADMINISTRASI LAINNYA
1	Komarudin, S.H	Panitera Pengganti.	Kasir
2	Christine M. Rohrohmana, S.H	Jurusita Pengganti	Petugas Meja I dan Bendahara Penerimaan
3	Apriani Samuel, S.Psi	Kasub Umum dan Keuangan	Pembuat Daftar Gaji
4	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama.	Operator Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
5	Dedy Widya Nugraha, S.Tr.Kom	Pengelola Barang Milik Negara	Bendahara Pengeluaran

Tabel 28. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA		PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan.	Pengemudi
2.	Syane Ratag, S.E.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti
3.	Esti Sitingjak, S.Kom.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
4.	Heni M. Klemen, S.H.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
5.	Rahmat, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pramubakti
6.	Izak Pattipeilohy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Satpam
7.	Ridwan Kristiawan, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pengemudi
8.	Jhon Lewakabessy, S.T.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Satpam
9.	Maikel P. kelyanin, S.T.	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti
10.	Hose Pondan Mangallo, S.E	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti

2. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Juni mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

Tabel 29. Pegawai yang Mendapat Promosi/Mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Meice Tjandra, S.E., S.H., M.H	Juru Sita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
2	Roy Erigh Pariaribo, S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Pontianak	Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

3. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Juni mengikuti Bimbingan Teknis ataupun Pelatihan yang diadakan oleh pihak terkait.

Tabel 30. Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Pelatihan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT / BIMTEK	PELAKSANAAN
1	Jusak Sindar, SH., MH. NIP. 19760401 200112 1 002	Ketua	Pembinaan Teknis secara Hybrid	Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
2	Merna Cinthia, SH., MH. NIP. 19781029 200112 2 001	Wakil Ketua		
3	Yusup Klemen, S.H. NIP. 19660512 199203 1 002	Hakim		
4	Ratna Jaya, SH., MH. NIP. 19750131 200604 2 001	Hakim		
5	Fefi Yanti Thomas, S.E. NIP. 19790310 200604 2 002	Sekretaris		
6	Suyadi, S.H. NIP. 19720515 199403 1 002	Panitera		
7	Donny Poja, S.H. NIP. 19770623 200904 1 002	Hakim	Bimbingan Teknis Sengketa Pengesahan Badan Hukum Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

8	Komarudin, S.H. NIP. 19830524 201212 1 002	Panitera Pengganti	Bimtek penyusunan BA persidangan bagi panitera pengganti tata usaha negara tahun anggaran 2024	Direktur pembinaan tenaga teknis dan administrasi peradilan tata usaha negara
9	Efraim Y. Patty, S.H., M.H. NIP. 19810731 200604 1 003	Panitera Pengganti		

4. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Fitri Yulyanti, S.H sebagai user administrator satuan kerja. Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	KETERANGAN
1	Jusak Sindar, S.H	Lengkap	-
2	Merna Cinthia, S.H., M.H	Lengkap	-
3	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
4	Donny Poja, S.H.	Lengkap	-
5	Ratna Jaya, S.H	Lengkap	-
6	Suyadi, S.H.	Lengkap	-
7	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
8	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
9	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-
10	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
11	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
12	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
13	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
14	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
15	Komarudin, SH	Lengkap	-
16	Meice Tjandra, S.E., S.H., M.H	Lengkap	-
17	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	Lengkap	-

18	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-
19	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
20	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-
21	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
22	Dedy Widya Nugraha, S.Tr.Kom	Lengkap	-
23	Fitri Yulyanti, S.H	Lengkap	-
24	M. Iltizam Al Husna, S.H	Lengkap	-
25	M. Nabil, S.H	Lengkap	-

3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan Juli Tahun 2024 tidak dilakukan revisi baik usulan DIPA maupun POK DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Kode Satker 539138 dan Badilmiltun Kode Satker 539139.

2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Tanggung jawab pengelolaan ada pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai SK Nomor 134/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI11/I/2024 tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Web admin diserahkan kepada Rafika, S.Pt selaku Kasubbag PTIP dan Ronald R. Wairo, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Pertama. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 310 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 20 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP sebesar 10 Mbps.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik ke depannya kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Perlu ditingkatkan juga pelatihan sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan lebih baik kedepannya.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang untuk kesekretariatan, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang bahkan tidak ada pegawai pada bagian Kepegawaian Ortala dan Sub bagian yang lainnya tidak memiliki staf pelaksana.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya pembangunan pagar tahap kedua yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 13 Agustus 2024

KETUA

JUSAK SINDAR

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05

Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI – T4, LI – T5, LI – T6)

LAMPIRAN 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN JULI 2024

SATKER/ KODE SATKER

PROPOSISI : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138)

BAGIAN ANGGARAN : PAPA (2500)

UNIT ORGANISASI : MAHKAMAH AGUNG (005)

NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023

NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 15 MARET 2024, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 22 APRIL 2024, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-3 TANGGAL 07 JUNI 2024, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-4 TANGGAL 10 JULI 2024

NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA		REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET	
			3	4	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%		
1	2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13	
1	005.01.WA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi												
	6986	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL												
	6986.EBA	Layanan Umum												
	6986.EBA.962	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan												
	051	Tes Urine bebas Narkoba (25 Orang x Rp 290.000)		7,250,000	6,380,000	88.00%	0	0.00%	6,380,000	88.00%	870,000	12.00%		
	A. 521219			7,250,000	6,380,000	88.00%	0	0.00%	6,380,000	88.00%	870,000	12.00%		
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003												
	6986.EBA.994	LAYANAN PERKANTORAN												
	001	Gaji dan Tunjangan												
	A. 511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,409,326,000		750,843,920	53.28%	97,131,820	6.89%	847,975,740	60.17%	561,350,260	39.83%		
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,000		10,408	45.25%	1,136	4.94%	11,544	50.19%	11,456	49.81%		
	511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	94,255,000		51,065,550	54.18%	6,402,040	6.79%	57,467,590	60.97%	36,787,410	39.03%		
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36,081,000		18,015,376	49.93%	2,260,226	6.26%	20,275,602	56.19%	15,805,398	43.81%		
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	34,160,000		18,720,000	54.80%	2,340,000	6.85%	21,060,000	61.65%	13,100,000	38.35%		
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,447,500,000		770,000,000	53.20%	96,250,000	6.65%	866,250,000	59.84%	581,250,000	40.16%		
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	342,229,000		170,152,123	49.72%	15,429,826	4.51%	185,581,949	54.23%	156,647,051	45.77%		
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	69,850,000		37,441,140	53.60%	4,779,720	6.84%	42,220,860	60.45%	27,629,140	39.55%		
	511129	Belanja Tunj. Uang Mekan PNS	187,310,000		78,841,000	42.09%	13,961,000	7.45%	92,802,000	49.54%	94,508,000	50.46%		
	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	202,343,000		98,495,000	48.68%	16,830,000	8.32%	115,325,000	56.99%	87,018,000	43.01%		
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	16,395,000		6,845,000	41.75%	1,110,000	6.77%	7,955,000	48.52%	8,440,000	51.48%		
	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	158,400,000		72,000,000	45.45%	12,000,000	7.59%	84,000,000	53.03%	74,400,000	46.97%		
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.001	3,997,872,000		2,072,429,517	51.84%	288,495,768	6.72%	2,340,925,285	58.55%	1,656,946,715	41.45%		
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor												
	A. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	583,764,000		261,069,048	44.72%	46,785,715	8.01%	307,854,763	52.74%	275,909,237	47.26%		
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	73,100,000		38,872,390	53.18%	22,394,400	30.64%	61,266,790	83.81%	11,833,210	16.19%		
	B. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Video Conference - Internet)	235,950,000		106,578,533	45.17%	25,995,400	11.02%	132,573,933	56.19%	103,376,067	43.81%		
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,160,000		1,951,800	9.68%	533,300	2.65%	2,485,100	12.33%	17,674,900	87.67%		
	522112	Belanja Langganan Telepon	4,428,000		1,743,042	39.36%	764,681	17.27%	2,507,723	56.63%	1,920,277	43.37%		
	522113	Belanja Langganan Air	1,620,000		280,000	17.28%	56,000	3.46%	336,000	20.74%	1,284,000	79.26%		
	522141	Belanja Sewa (Web Hosting)	5,500,000		0	0.00%	5,239,200	95.26%	5,239,200	95.26%	260,800	4.74%		
	C. 523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	501,660,000		497,104,503	99.09%	5,239,200	0.00%	497,104,503	99.09%	4,555,497	0.91%		

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56,713,000	56,700,000	99.98%		0.00%	56,700,000	99.98%	13,000	0.02%	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	208,493,000	89,814,001	43.08%	10,875,425	5.22%	100,689,426	48.29%	107,803,574	51.71%	
	D. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Pakaian Dinas)	34,152,000	34,000,000	99.55%		0.00%	34,000,000	99.55%	152,000	0.45%	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56,712,000	13,662,000	24.09%	13,794,000	24.32%	27,456,000	48.41%	29,256,000	51.59%	
	H. 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119,080,000	37,312,914	31.33%	36,729,206	30.84%	74,042,120	62.18%	45,037,880	37.82%	
		JUMLAH KEGIATAN 6886.EBA.962	1,901,332,000	1,139,088,231	59.91%	163,167,327	8.58%	1,302,255,558	68.49%	599,076,442	31.51%	
		JUMLAH KESELURUHAN	5,906,454,000	3,217,897,748	54.48%	431,663,095	7.31%	3,649,560,843	61.79%	2,256,893,157	38.21%	

Jumlah Anggaran	5,906,454,000	Percentase
Realisasi Anggaran	3,649,560,843	61.79%
Sisa Anggaran	2,256,893,157	38.21%



FEBI YANTI THOMAS, SE.
NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN JULI 2024

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 22 APRIL 2024, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 12 JULI 2024

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
	1059.AEA	Koordinasi										
I	1059.AEA.003	Dukungan Penyelesaian Perkara										
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang										
	A. 521211	- Konsumsi Pengamanan Sidang (25 Org x 16 Kali)	20,500,000	7,500,000	36.59%	2,500,000	12.20%	10,000,000	48.78%	10,500,000	51.22%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.AEA	20,500,000	7,500,000	36.59%	2,500,000	12.20%	10,000,000	48.78%	10,500,000	51.22%	
II	1059.BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara										
	051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara										
	A. 521114	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	360,000	9,000	2.50%		0.00%	9,000	2.50%	351,000	97.50%	
	A. 521211	- Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Perijilidan Berkas Perkara	150,000	50,000	33.33%		0.00%	50,000	33.33%	100,000	66.67%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
		JUMLAH KEGIATAN 1059.BCA	510,000	59,000	11.57%	0	0.00%	59,000	11.57%	451,000	88.43%	
III	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521211	- Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4,200,000	2,532,000	60.29%		0.00%	2,532,000	60.29%	1,668,000	39.71%	
	A. 522131	- Belanja Jasa Konsultansi Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 bln)	28,800,000	12,000,000	41.67%	2,400,000	8.33%	14,400,000	50.00%	14,400,000	50.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.QBA	33,000,000	14,532,000	44.04%	2,400,000	7.27%	16,932,000	51.31%	16,068,000	48.69%	
IV	1059.QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Sidang di luar Gedung Pengadilan										
	A. 522191	- Belanja Jasa (Biaya uang kebersihan)	200,000	100,000	50.00%	100,000	50.00%	200,000	100.00%	0	0.00%	
	524111	- Tiket (5 Org x 2 Keg)	54,000,000	24,349,500	45.09%		0.00%	24,349,500	45.09%	29,650,500	54.91%	
		- Transportasi (5 Org x 1 PP x 2 Keg)	4,310,000	4,200,000	97.45%		0.00%	4,200,000	97.45%	110,000	2.55%	
		- Penghinaan (5 Org x 2 Hari x 2 Keg)	20,760,000	17,530,000	84.44%		0.00%	17,530,000	84.44%	3,230,000	15.56%	
		- Uang Harian (5 Org x 3 Hari x 2 Keg)	17,400,000	15,900,000	91.38%		0.00%	15,900,000	91.38%	1,500,000	8.62%	
			96,670,000	62,079,500	64.22%	100,000	0.10%	62,179,500	64.32%	34,490,500	35.68%	
		JUMLAH KESELURUHAN	150,680,000	84,170,500	55.86%	5,000,000	3.32%	89,170,500	59.18%	61,509,500	40.82%	

Jumlah Anggaran	150,680,000	Percentage
Realisasi Anggaran	89,170,500	59.18%
Sisa Anggaran	61,509,500	40.82%



LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

TAHUN : 2024
BULAN : Juli
NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2024 / 24-11-2023
DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KPPN : JAYAPURA

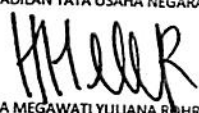
NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH DISETOR
1		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan				
		- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	7	-	Rp. 16.847.124	Rp. 16.847.124
JUMLAH I					Rp. 16.847.124	Rp. 16.847.124
JUMLAH I s/d I					Rp. 16.847.124	Rp. 16.847.124

Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



Fefi Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

Jayapura, 1 Agustus 2024
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNB

FORM 01A

TAHUN : 2024
BULAN : Juli
NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2024 / 24-11-2023
DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
PROVINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI
1		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 0	Rp. 14.397.197	Rp. 2.449.927	Rp. 16.847.124
		JUMLAH I	Rp. 0	Rp. 14.397.197	Rp. 2.449.927	Rp. 16.847.124
		JUMLAH I s/d I	Rp. 0	Rp. 14.397.197	Rp. 2.449.927	Rp. 16.847.124

Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Feti Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

Jayapura, 1 Agustus 2024
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

LAMPIRAN 4
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05

TAHUN : 2024
 BULAN : Juli
 NOMOR / TANGGAL DIPAT : [12.15, 31/1/2024] Christine: Yg 01 dan 05 [12.22, 31/1/2024] PTUN Pak. komar: SP DIPA-005.05.2.539139/2024 / 31-01-2024
 DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH DISETOR
1		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
425232		Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan				
		- Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	88	10	Rp. 280.000	Rp. 280.000
425233		Pendapatan Ongkos Perkara				
		- Pendaftaran Permohonan Kasasi	9	50	Rp. 450.000	Rp. 450.000
		- Pendaftaran Gugatan/Permohonan	15	30	Rp. 450.000	Rp. 450.000
		- Pendaftaran Permohonan Banding	6	50	Rp. 300.000	Rp. 300.000
425239		Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya				
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon PK	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon Kasasi	8	10	Rp. 80.000	Rp. 80.000
		- Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	14	10	Rp. 140.000	Rp. 140.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	13	10	Rp. 130.000	Rp. 130.000
		- Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	9	10	Rp. 90.000	Rp. 90.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon PK	8	10	Rp. 80.000	Rp. 80.000
		- Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	25	10	Rp. 250.000	Rp. 250.000
		- Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	2,375	500	Rp. 1.187.500	Rp. 1.187.500
		- Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon	14	10	Rp. 140.000	Rp. 140.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	18	10	Rp. 180.000	Rp. 180.000
		- Permohonan Pengawasan Eksekusi	20	10	Rp. 200.000	Rp. 200.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	2	25	Rp. 50.000	Rp. 50.000
		- Surat Penyerahan Memori Kasasi	18	10	Rp. 180.000	Rp. 180.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan	27	10	Rp. 270.000	Rp. 270.000
		- Surat Penyerahan Memori Banding	8	10	Rp. 80.000	Rp. 80.000
		- Redaksi Putusan/Penetapan	13	10	Rp. 130.000	Rp. 130.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pembanding	14	10	Rp. 140.000	Rp. 140.000
		- Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	17	10	Rp. 170.000	Rp. 170.000
		- Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	2	10	Rp. 20.000	Rp. 20.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon Kasasi	35	10	Rp. 350.000	Rp. 350.000
		- Pencabutan Gugatan/Permohonan	6	10	Rp. 60.000	Rp. 60.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	12	10	Rp. 120.000	Rp. 120.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Terbanding	6	10	Rp. 60.000	Rp. 60.000
		JUMLAH I	20	10	Rp. 200.000	Rp. 200.000
		JUMLAH I s/d I			Rp. 6.417.500	Rp. 6.417.500
					Rp. 6.417.500	Rp. 6.417.500

Mengetahui
 Sekretaris
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

 Feli Yanti Thomas, SE
 NIP. 197903102006042002

Jayapura, 1 Agustus 2024
 Bendahara Penerimaan
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

 CHRISTINA MEGAWATI YULIANA RONROHMANA, S.H.
 NIP. 198508172019032006

TAHUN : 2024
BULAN : Juli
NOMOR / TANGGAL DIPA : [12.15, 31/1/2024] Christine: Yg 01 dan 05 [12.22, 31/1/2024] PTUN Pak. komar: SP DIPA-005.05.2.539139/2024 / 31-01-2C
DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
PROVINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI
1		Pendapatan Keajaiban/Peradilan				
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	Rp. 0	Rp. 830.000	Rp. 50.000	Rp. 880.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 0	Rp. 980.000	Rp. 220.000	Rp. 1.200.000
	425239	Pendapatan Keajaiban dan Peradilan Lainnya	Rp. 0	Rp. 3.926.000	Rp. 411.500	Rp. 4.337.500
		JUMLAH I	Rp. 0	Rp. 5.736.000	Rp. 681.500	Rp. 6.417.500
		JUMLAH I s/d I	Rp. 0	Rp. 5.736.000	Rp. 681.500	Rp. 6.417.500

Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jayapura, 1 Agustus 2024
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA


Petyanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002


CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN JULI TAHUN 2024

FORMULIR 11-11																				
NO	NOMOR PERKARA	DESMISAL				ACARA PENGAKT				ACARA BAKHAGARA CEPAT				SISA ANJUR		NOMOR PERKARA BELUM DAPATASI	KETERANGAN			
		TANGGAL PENGACARAAN	NAMA KETUA PANITIA	PAHAGILAN	TANGGAL	TERIMA PELAYAN	TANGGAL	PERCHITAPAN	MAJELIS HAKIM & PP	DIMULAI SDANG	TANGGAL PERULAN	DIMULAI PUTUSAN	PERKESHA PERSADAPAN	TANGGAL PUTUSAN	DIMULAI BELUM DITUTUS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	100004PTUH JPR	16-01-2024	.	.	.	.	.	.	.	.	16-01-2024	C1 C1 C3 C2	30-01-2024	14-03-2024	.	.	10/0024	KETUA : JUSAK BHOAR, SH WAKIL KETUA : MERHA CHTHA S.H, M.H HAKIM HAKIM	A	
2	400004PTUH JPR	07-02-2024	.	.	.	.	.	.	.	.	07-02-2024	B C1 C3 C01	21-02-2024	26-03-2024	.	.	40/0024	1 YUSUP KLEMEN, SH 2 BATIA JAYA, SH, MH	C1	
3	600004PTUH JPR	13-03-2024	.	.	.	.	.	.	.	.	13-03-2024	B C1 C3 C06	20-03-2024	24-04-2024	.	.	60/0024	3 EDUHYKHA, SH 4 EDUHYKHA, SH	C2	
4	800004PTUH JPR	03-04-2024	.	.	.	.	.	.	.	.	03-04-2024	B C1 C3 C26	18-04-2024	8-05-2024	.	.	80/0024	5 SUYADI, SH 6 ACE RUCAMTO	C3	
5	100004PTUH JPR	17-04-2024	.	.	.	.	.	.	.	.	17-04-2024	C3 C1 C7 C03	25-04-2024	27-05-2024	.	.	60/0024	7 JERKAWI RISANOTIA S.H, M.H 8 PETRUS MITING, SH	D1	
6	100004PTUH JPR	05-06-2024	.	.	.	.	.	.	.	.	02-06-2024	C1, C2, C3 C07	13-06-2024	25-06-2024	.	.	100/0024	9 DAVID ALUK MITING, SH 10 ELIZABETH KAKATUT, SH	D2	
7	1100004PTUH JPR	14-06-2024	.	.	.	.	.	.	.	.	14-06-2024	B, C1, C3 C02	21-06-2024	11-06-2024	.	.	110/0024	11 EFRANI YOSEPH PATTI, SH, M.H 12 KOMAR, OH, SH	D3	
8	1200004PTUH JPR	14-06-2024	.	.	.	.	.	.	.	.	14-06-2024	C1 C2 C3 C07	21-06-2024	20-07-2024	.	.	130/0024	13 REKAPUTASJI 14 Sisa Budin Lelu	D4	
9	130004PTUH JPR	01-07-2024	.	.	.	.	.	.	.	.	01-07-2024	A, C1, C3 C0	06-07-2024	23-07-2024	.	.	130/0024	15 Mawik Budin, m 16 Pica	D5	
10	140004PTUH JPR	16-07-2024	.	.	.	.	.	.	.	.	16-07-2024	C3 C1, C2 C05	16-07-2024	24-07-2024	.	.	140/0024	17 Dimasul 18 Chud	D6	
11	1500004PTUH JPR	23-07-2024	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20-07-2024	.	.	150/0024	19 Sisa Budin, m 20 Belum di bagi	D7
12	160004PTUH JPR	20-07-2024	.	.	.	.	.	.	.	.	20-07-2024	B, C1, C3 C01	11-08-2024	.	.	.	160/0024	21 Belum di bagi 22 Dalam Mawik	D8	

Mengetahui:

KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



JUSAK SINDAR

Jayapura, 31 Juli 2024

PANTERA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUTADI

Formulir LJ - T2																											
NO	JENIS PERKARA	PERKARA			PENGGUGAT		TERGUGAT		PERLAWANAN		PUTUSAN						Permohonan				KET.						
		MASUK	DICABUT	JUMLAH	PERORANGAN	BADAN HUKUM	PUSAT	DAERAH	DISMISSAL	DITOLAK	DIKABULKAN	GUGUR	DICABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIKABULKAN	JUMLAH	SISA PERKARA BULAN INI	BANDING	KASASI		PERINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI	BANDING	KASASI	PERINJAUAN KEMBALI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	GUGATAN	2	4	1	5	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	2	1	-	
1	Pertanahan	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kepala Desa dan Perangkat desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pergantian Antar Waktu (PAW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Fiklif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Tindakan Faktual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Merek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Lain - Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	8	4	1	11	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	2	-	-	3	1	-	

Mengetahui :
KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara

LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO
BULAN JULI TAHUN 2024

Formulir U - T3					
No.	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	TANGGAL PUTUSAN	BIAYA PERKARA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	8/G/20024/PTUN.JPR	KEPEGAWAIAN		Rp. 265.000	Persidangan dengan acara pemeriksaan bukti surat para pihak

Mengetahui :

KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura


JUSAK SINDAR

Jayapura, 31 Juli 2024

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUYADI

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN JULI 2024

Formulir LI - T4

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	NAMA PENERIMA JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	JENIS JASA BANTUAN	KETERANGAN
1	-	03-07-2024	Paulus W. Hamadi	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENARA KEADILAN SEJATI, Tlp. 082199812386, Jln Raya Abu Pantel Enggros Belakong Kantor Lurah Wai Mhorock, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Hak Ulayat	
2	-	05-07-2024	Sri Ulfinda		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Percobaan Penipuan Melalui Arisan	
3	-	08-07-2024	Huygens Joule Monim		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait PTDH	
4	-	10-07-2024	Marta S. Rendat		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Pemukulan	
5	-	15-07-2024	Lisa Saepul		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Penipuan untuk Menjadi CPNS	
6	-	16-07-2024	Allian Manip Stefanus A		Pemohon	Meminta Pendampingan Advokat di Kejaksaan Negeri Jayapura	
7	-	18-07-2024	Josephina Lavina Sisiharey		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Pengangkatan Honorer Menjadi Pegawai	
8	-	24-07-2024	Simon Renjaan		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Sertifikat Ganda	
9	-	30-07-2024	Abdul Aziz		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Pemalsuan Pelepasan Tanah	

Jayapura, 31 Juli 2024

Mengolautui,
KETUA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

PANITERA

Pengadilan Tata Usaha negara

JUSAK SINDAB

SUZEL

[illegible]

KETUA,
Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura




JUSAK SINDAR

Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura

SUYASRI



BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

BENDAHARA PERKARA

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh satu bulan juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat saya selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melakukan Pemeriksaan dan Penutupan Kas Bendahara Perkara dengan keadaan sebagai berikut :

Adapun hasil penutupan kas adalah sebagai berikut :

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A	1	Saldo Bulan Lalu	Rp	26.115.000	
	2	Jumlah Penerimaan	Rp	6.656.000	
	3	Jumlah Pengeluaran	Rp	4.009.000	
	4	Saldo Pembukuan	Rp	28.762.000	
	5	Saldo			Rp 28.762.000

II Saldo Menurut Kas , terdiri dari :

	1	Uang Tunai	Rp	1.982.600	
	2	Saldo Bank	Rp	26.779.400	
	3	Surat Berharga	Rp	-	
	4	Meterai	Rp	- (+)	
	5	Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)			Rp 28.762.000

III Hasil Pemeriksaan Kas :

A Kas Perkara Yang di Kuasai Bendahara Perkara

1	Uang Tunai di Brankas				
	Uang Kertas =	100.000 x 19 lbr	Rp	1.900.000	
		50.000 x 1 lbr	Rp	50.000	
		20.000 x 1 lbr	Rp	20.000	
		10.000 x 1 lbr	Rp	10.000	
		2.000 x 1 lbr	Rp	2.000	
	Uang Logam	500 x 1	Rp	500	
		100 x 1	Rp	100	
	Meterai	-	Rp	- (+)	
	Jumlah				Rp 1.982.600

B Uang Kas Titipan Pihak Ketiga (Eksekusi) yang ada di Brankas

1 Uang Tunai di Brankas

	Uang Kertas =	100.000 x 3 lbr	Rp	300.000	
		50.000 x 19 lbr	Rp	950.000	
		20.000 x 1 lbr	Rp	20.000	
		10.000 x 1 lbr	Rp	10.000	
		5.000 x 2 lbr	Rp	10.000	
		2.000 x 2 lbr	Rp	4.000	
		1.000 x 1 lbr	Rp	1.000	
	Jumlah				Rp 1.295.000

Yang diperiksa
Kasir Perkara

KOMARUDIN, S.H.
NIP. 198305242012121002

Jayapura, 31 Juli 2024
Pemeriksa
Panitera

SUYADI, S.H.
NIP. 197205151994031002



LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN JULI TAHUN 2024

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form : LI-16

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	26.115.000	-	-	26.115.000
2	Penerimaan	-	6.656.000	-	6.656.000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	625.000	625.000
4	Biaya Panggilan	-	-	75.000	75.000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	1.094.000	1.094.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	150.000	150.000
8	Biaya Pengiriman	-	-	503.000	503.000
9	Materai	-	-	30.000	30.000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	190.000	190.000
	b. Redaksi	-	-	30.000	30.000
	c. PNBP lain-lain	-	-	381.000	381.000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	931.000	931.000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
	Jumlah	26.115.000	6.656.000	4.009.000	28.762.000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	7.320.500	-	-	7.320.500
2	Penerimaan	-	625.000	-	625.000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	-	-
	Jumlah	7.320.500	625.000	-	7.945.500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	934.000	-	-	934.000
2	Penerimaan	-	500.000	-	-
3	Pendaftaran Eksekusi	-	-	25.000	25.000
4	ATK Eksekusi	-	-	50.000	50.000
5	Materai	-	-	-	-
6	Biaya Surat Panggilan	-	-	64.000	64.000
7	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	-	-
8	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
9	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
10	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	934.000	500.000	139.000	1.295.000

PANTERA

SUYADI, S.H.
NIP. 19720515 199403 1 002

Jayapura, 31 Juli 2024
KASIR

KOMARUDIN, S.H.
NIP. 198305242012121002

Kepada Yth. / To :

**RPL 063 PTUN JAYAPURA PDT BIAYA
PERKARA**
JALAN RAYA SENTANI WAENA
Rt.001/001, Rt.001/001, KOTA JAYAPURA HERAM
KOTA JAYAPURA

Tanggal Laporan : 01/08/24
Statement Date

Periode Transaksi : 01/07/24 - 30/07/24
Transaction Period

No. Rekening : 214201000003307
Account No

Unit Kerja : KCP WAENA
Business Unit

Nama Produk : Giro Tres.NolP
Product Name

Alamat Unit Kerja : WAENA
Business Unit Address
JAYAPURA

Valuta : IDR
Currency

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
03/07/24 13:02:27	BRIVA19845493240700002NBMBYARIDUL ADDAD BRIVA 19845493240700002NBMBYARIDUL ADDAD ESB:NBMB:0200200P:704756762120	8888099	0.00	15,000.00	20,138,400.00
03/07/24 13:03:29	BRIVA19845493240700001NBMBYARIDUL ADDAD BRIVA 19845493240700001NBMBYARIDUL ADDAD ESB:NBMB:0200200P:704757182884	8888574	0.00	15,000.00	20,153,400.00
15/07/24 09:34:54	NBMB MEYTHA ULU PAK TIJ RPL 063 PTUN JAYA ESB:NBMB:0001500F:709447847817	8888286	0.00	16,500.00	20,169,900.00
15/07/24 11:44:03	BFVA19845493240700004 FTTRJANY :BMRIDJA 20240715BMRIDJA01000222434014 ESB:BFST:0008N:2024071588332463	8888628	0.00	865,000.00	21,034,900.00
17/07/24 15:24:33	5895874301104894#00000008219#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM YARIDUL ADDAD FA LA 214201000003307ATM 5895874301104894	0888185	0.00	2,000,000.00	23,034,900.00
17/07/24 15:25:41	5895874301104894#00000008221#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM YARIDUL ADDAD FA LA 214201000003307ATM 5895874301104894	0888016	0.00	2,000,000.00	25,034,900.00
22/07/24 17:13:18	BRIVA19845493240700006NBMBAGUSTINUS SH M BRIVA 19845493240700006NBMBAGUSTINUS SH M ESB:NBMB:0200200P:712392013156	8888029	0.00	865,000.00	25,899,900.00
25/07/24 10:31:30	BRIVA19845493240700007NBMBAGUSTINUS SH M BRIVA 19845493240700007NBMBAGUSTINUS SH M ESB:NBMB:0200200P:713403165023	8888269	0.00	865,000.00	26,764,900.00
26/07/24 08:16:49	BFVA19845493240700008 FULGENTIU:BMRIDJA 20240726BMRIDJA0100022243311658 ESB:BFST:0008N:2024072623508679	8888612	0.00	14,500.00	26,779,400.00

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debit Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
20,123,400.00	0.00	6,656,000.00	26,779,400.00

Terbilang / In Words

Kepada Yth. / To :

**RPL 063 PTUN JAYAPURA PDT BIAYA
PERKARA**

JALAN RAYA SENTANI WAENA
Rt.001/001, Rt.001/001, KOTA JAYAPURA HERAM
KOTA JAYAPURA

Tanggal Laporan : 01/08/24
Statement Date

Periode Transaksi : 30/07/24 - 31/07/24
Transaction Period

No. Rekening : 214201000003307
Account No

Nama Produk : Giro Tres.NotP
Product Name

Valuta : IDR
Currency

Unit Kerja : KCP WAENA
Business Unit

Alamat Unit Kerja : WAENA
Business Unit Address JAYAPURA

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
30/07/24	Transaksi tidak ditemukan		0.00	0.00	26,779,400.00
Saldo Awal Opening Balance		Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance	
26,779,400.00		0.00	0.00	26,779,400.00	

Terbilang / In Words

DUA PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS RUPIAH
TWENTY SIX MILLION SEVEN HUNDRED SEVENTY NINE THOUSAND FOUR HUNDRED RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

LAPORAN REALISASI ANGGARAN POSBAKUM
BULAN JULI 2024

SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-1 TANGGAL 22 APRIL 2024, SP DIPA- 005.01.2.539138/2024 REVISI KE-2 TANGGAL 12 JULI 2024

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI SID BULAN INI		SISA DANA SID BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/4	9=7+7	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
III	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521211	- Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4,200,000	2,532,000	60.29%		0	2,532,000	60.29%	1,668,000	39.71%	
	A. 522131	- Belanja Jasa Konsultansi Hukum (3 jam x 2 Hari x 4 Mg x 12 bin)	28,800,000	12,000,000	41.67%	2,400,000	8.33%	14,400,000	50.00%	14,400,000	50.00%	
		JUNILAH KEGIATAN 1059.QBA	33,000,000	14,532,000	44.04%	2,400,000	7.27%	16,932,000	51.31%	16,068,000	48.69%	

Jumlah Anggaran	33,000,000	Percentage
Realisasi Anggaran	16,932,000	51.31%
Sisa Anggaran	16,068,000	48.69%

